

Edisi khusus
Dialog Kebangsaan
(JEC putaran IX)



Kembali Kepada Jati Diri Bangsa

Kembali Kepada
Jati Diri Bangsa

Kembali Kepada
Jati Diri Bangsa

halaman:
xii + 264

cetakan:
Agustus 2013

diterbitkan oleh:

Kedaulatan Rakyat - Universitas Janabadra Yogyakarta - Rumah Suluh

Kembali Kepada Jati Diri Bangsa

[Kedaulatan Rakyat, Universitas Janabadra Yogyakarta, Rumah Suluh]

PENGANTAR

Dalam Pidato pada 1 Juni 2011 di Gedung Nusantara IV Kompleks MPR/DPR/DPD, Presiden ke-3 RI, Prof. Dr. Ing Bacharudin Jusuf Habibie, menyatakan: "... selama enam puluh tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik, sejak jaman demokrasi parlementer, era demokrasi Pancasila, sehingga demokrasi multi partai di era reformasi saat ini. Di setiap jaman Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tidak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah ... karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah-olah hilang dari memori kolektif bangsa..." "

Kesaksian Presiden ke-3 RI ini tentu saja sangat penting. Hal ini menegaskan apa yang telah kita sebutkan di atas, bahwa kita sedang berjalan di luar haluan Negara. Dalam forum yang sama, Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, menegaskan

pula, bahwa: "... di tengah-tengah krisis ideologi yang melanda bangsa ini, dan di tengah-tengah kegamangan kita melihat masa depan, Pancasila kembali menghadirkan diri sebagai pelita besar bagi kita semua dan sebagai perkat bangsa. Sebagai salah satu bukti, bahwa Pancasila mampu tetap menjadi perekat bangsa, yaitu suatu pergantian kekuasaan pada periode 1998 sampai 2004 telah terjadi empat kali pergantian kepemimpinan nasional, tetapi bangsa Indonesia tetap masih bersatu, sama halnya dengan apa yang terjadi masa-masa pada krisis yang lalu, Pancasila selalu hadir sebagai solusi kebangsaan. ..." Apa maknanya?

Sangat jelas bahwa ketika bangsa berjalan di luar atau ke luar dari haluannya, maka tidak ada jalan yang paling baik, kecuali kembali kepada haluan tersebut. Kesaksian Ibu Megawati Soekarnoputri sangatlah jelas: ketika kita dalam keadaan krisis, maka Pancasila hadir menjadi solusi. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Bung Karno ketika memberikan kursus Pancasila pada 26 Mei 1958 di Istana Negara, "... Tetapi kecuali Pancasila adalah suatu weltanschauung, satu dasar falsafah. Pancasila adalah satu alat pemersatu, yang saya yakin seyakinyakinnya Bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Dan bukan saja alat mempersatu untuk diatasnya kita letakkan Negara Republik Indonesia, tetapi juga pada hakekatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita ..." Pandangan ini hendak menegaskan bahwa Pancasila, bukan hanya sebagai landasan dalam menyusun tata hidup bersama sebagai sebuah bangsa, melainkan juga sebagai landasan perjuangan, baik untuk menjawab sebuah tantangan yang ada, maupun dalam kita menyegerakan diri mencapai apa yang menjadi cita-cita

proklamasi kemerdekaan.

Buku ini pada dasarnya adalah kumpulan tulisan yang akan disampaikan (dan yang menjadi sumbangan pemikiran) dalam Dialog Kebangsaan, yang bertajuk: Kembali Kepada Jati Diri Bangsa, yang diselenggarakan di Kampus Universitas Janabadra, hasil kerjasama antara Harian Kedaulatan Rakyat, Universitas Janabadra dan Rumah Suluh. Dialog ini sendiri dimaksudkan untuk melakukan refleksi bersama dan dialog, dengan tujuan menggali berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan darisana diharapkan diperoleh jalan keluar yang terbaik. Konsep kembali kepada jati diri bangsa, dimaksudkan sebagai kesaksian dan sekaligus sebagai jalan keluar. Hal ini bermakna bahwa dalam menghadapi berbagai tantangan yang kini berkembang, hendaklah kita kembali kepada nilai-nilai dasar dan kembali kepada semangat awal, semangat proklamasi kemerdekaan. Berbagai pemikiran yang termuat dalam buku ini, diharapkan menjadi bagian dari dialog (baik yang bersifat umum maupun yang bersifat akademiko. Dengan bunga rampai ini diharapkan muncul pula berbagai pemikiran strategis, yang dapat ikut menyumbangkan jalan ke luar terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Semoga buku ini memberi makna.

DAFTAR ISI

PENGANTAR ~~~~ v

DAFTAR ISI ~~~~ ix

PROLOG:

KEMBALI KEPADA TUJUAN KEMERDEKAAN BANGSA

Rumah Suluh ~~~~ 1

BAB I :

KEMBALI KE JATI DIRI BANGSA: TANTANGAN DAN PELUANG

1. KEMBALI KE JATI DIRI BANGSA :
Tantangan Membumikan Empat Pilar Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara
Drs. H. Sidarto Danusubroto ~~~~ 23
2. LANDASAN DAN PILAR KEBANGSAAN MENJAWAB
TANTANGAN GLOBALISASI
Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec ~~~~ 57

3. PANCASILA DAN NASIONALISME INDONESIA DI TENGAH PUSARAN GLOBAL
Prof. Em. Dr. Wuryadi, MS ~~~~ 67
4. KE MANA EKONOMI INDONESIA DI TENGAH TURBULENSI EKONOMI DUNIA?
Prof. Dr. Sri Adiningsih ~~~~ 83
5. AGENDA REFORMASI MENUJU INDONESIA BARU
Drs. Purnawan Hardiyanto M.Ec.Dev ~~~~ 93
6. EMPAT PILAR KEBANGSAAN DALAM PERSPEKTIF HOLARKI
Dr. Cungki Kusdarjito ~~~~ 99
7. KEBANGKITAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH, BUDAYA DAN PENDIDIKAN
Drs. Slamet Sutrisno ~~~~ 109
8. JATI DIRI BANGSA
Drs. H.M. Idham Samawi ~~~~ 121
9. REAKTUALISASI POLITIK KEBANGSAAN
Lambang Trijono, MA ~~~~ 129
10. PERS PANCASILA DI TENGAH LOMPATAN 'NEW MEDIA'
Drs. Octo Lampito ~~~~ 137
11. AKTUALISASI EKONOMI PANCASILA
Ahmad Ma'ruf, MA ~~~~ 141

BAB II :

EMPAT PILAR: MANUSIA INDONESIA, PENDIDIKAN DAN PEMBUDAYAAN

1. REFLEKSI KEBANGSAAN KEMBALI KE JATI DIRI
MANUSIA INDONESIA : Mencetak Manusia Mandiri
Prof. Dr. Totok Gunawan, MS ~~~~ 149
2. BEBERAPA PERMASALAHAN PENYEBAB JATI DIRI
BANGSA MEMUDAR DAN CARA ALTERNATIF
MENGATASINYA
Prof. Rusgianto, HS ~~~~ 173
3. POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM DIALOG
KEBANGSAAN
Dr. Ir. Bambang Supriyadi, CES.DEA. ~~~~ 187
4. DIALOG KEBANGSAAN “KEMBALI KE JATI DIRI
BANGSA”
Dr. Ir. Premonowati, MT ~~~~ 193
5. BUNİYAL INDONESIA ‘ALA KHAMSIN (MERAJUT TALI
JIWA INDONESIA)
Dr. Waryono Abdul Ghafur ~~~~ 195
6. PENDIDIKAN KARAKTER MEMBENTUK WATAK
MANUSIA INDONESIA
Ki Priyo Dwiwarso ~~~~ 201
7. KEBUDAYAAN SEBAGAI SUMBER PEMBENTUKAN
KARAKTER BANGSA
Bondan Nusantara ~~~~ 205

8. IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA : Mentafsir sila Kelima Pancasila
Dr. Zuli Qodir ~~~~ 201
9. KOMUNITAS PANCASILA
H.M. Idham Samawi ~~~~ 239
10. BANGKITNYA NASIONALISME DI KALANGAN PEMUDA
Supriyanto, ST. MM. ~~~~ 245
11. MENEGAKKAN PILAR KEMANUSIAAN BAGI KEISTIMEWAAN
Dr. Lukas S. Ispandriarno ~~~~ 259

BUNIYAL INDONESIA 'ALA KHAMISIN MERAJUT TALI JIWA INDONESIA

Dr. Waryono Abdul Ghafur

BANYAK yang mengatakan bahwa Indonesia dengan Pancasila, sampai usia kemerdekaannya yang ke 68 hanya tinggal satu yang tersisa yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia, setidaknya sampai 2013 ini masih utuh, tidak seperti Cekoslovakia, Yugoslavia dan Uni Sovyet. Sedangkan yang lainnya, yaitu tujuan didirikannya negara ini, sampai presiden yang ke enam, tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan.

Untuk membuktikan pernyataan di atas ada baiknya kita telaah ulang sejarah bangsa dan Negara ini sejak dari awal. Sejak dari semula didirikan atau merdeka, Negara ini sudah terdiri dari masyarakat yang multiras dan etnik, yang menganut agama dan kepercayaan yang sangat beragam, baik agama maupun kepercayaan lokal (agama dan kepercayaan pribumi, *indigineous religion*) maupun agama atau kepercayaan yang datang dari luar seiring terjadinya mobilitas massif manusia, yang mendiami bumi pertiwi ini di berbagai pulau, baik besar maupun kecil. Semua

komponen atau elemen bangsa tersebut berkomitmen untuk mengikatkan diri sebagai satu kesatuan dalam ke-Indonesiaan, dengan tidak menghilangkan identitasnya yang otentik dan melakukan pemaksaan untuk penyeragaman. Realitas inilah yang sering orang menyebutnya sebagai fenomena Bhineka Tunggal Ika atau *unity in diversity* atau *e pluribus unum*.

Ini tentu saja berbeda dengan Pakistan misalnya yang sejak awal didirikan adalah sebagai sebuah Negara yang hanya bagi umat Islam sebagai konsekuensi penerapan teori dua bangsa (*two-nation theory*) yang dibuat oleh Ali Jinnah. Karena itu, meski dalam perkembangannya, Pakistan tidak hanya berpenduduk Muslim, namun di sana, Islam dan Muslim adalah segalanya. Segala bentuk kebijakan dan konsekuensinya adalah demi Islam dan kaum Muslim semata. Hal ini tentu saja berbeda secara diametral dengan Indonesia.

Berangkat dari keragaman yang kompleks tersebut, secara internal rumusan tujuan didirikannya Negara ini – sebagaimana secara tersurat sangat jelas dalam pembukaan UUD 45- adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (dengan segala keragamannya), memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini tentu saja dirumuskan dengan keasadaran penuh para pendiri bangsa bahwa anak bangsanya terdiri dari beragam agama dan kepercayaan, etnis dan ras, strata sosial dan masih banyak yang memiliki akses pendidikan yang memadai. Dalam tujuan itu, tidak sedikitpun bahkan yang tersirat bahwa Negara ini kelak akan mendeskreditkan apalagi mengkriminalkan agama dan kepercayaan warganya atau melakukan diskriminasi terhadap warganya agar tetap miskin, tertinggal, lemah dan bodoh.

Karena itu dalam UUD 45 pula dengan tegas dinyatakan bahwa mereka yang masih lemah, tertinggal dan tertindas akan dilindungi oleh Negara. Pertanyaannya, sudahkan tujuan itu tercapai secara merata. Pertanyaan ini patut diajukan kepada kita semua yang masih berkomitmen sebagai bangsa yang terikat dalam NKRI, di tengah masih banyak menyeruaknya tragedi kemanusiaan di tengah-tengah kita. Sebagai contoh dapat disebutkan antara lain; penusukan tokoh agama HKBP yang di duga dilakukan oleh FPI, orang-orang Ahmadiyah yang diperlakukan tidak manusiawi, pengusiran penganut Syi'ah dari desanya di Jawa Timur, perilaku social menyimpang seperti korupsi dan lain-lain.

Jawabnya: setelah satu abad kebangkitan nasional, tujuan di atas masih sebatas menjadi catatan di atas kertas dan Pancasila yang tercantum dalam bagian pembukaan UUD belum mengilhami bangsa ini untuk melakukannya secara jujur dan konsekuen. Akibatnya:

1. Negara tak kunjung dapat memerdekakan sebagian anak bangsanya dari himpitan hidup yang semakin hari menyesak dada dan membuat hidup jadi terasa singkat.
2. Negara masih belum dapat melindungi segenap warganya, bukan saja dari warga yang lain, tapi juga bahkan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
3. Kesejahteraan belum dapat dinikmati dan dirasakan bersama oleh banyak orang di tengah melimpahnya kekayaan negeri khatulistiwa ini. Kesejahteraan masih menjadi barang mahal untuk sebagian orang yang lemah secara ekonomi, sosial dan politik. Kenyataan ini dideskripsikan oleh pengamat seperti “ayam mati

di lumbung padi”. Sementara bagi sebagian orang yang kuat secara ekonomi, sosial dan politiknya bagaikan “ayam broiler”: lebih banyak menggantungkan hidupnya pada yang pihak lain, dicukupi segala kebutuhan hidupnya, tetapi hanya untuk satu tujuan “disembelih” untuk dimakan atau ditukar dengan uang. Di sini kelihatan, kalau bangsa ini tidak memiliki harga diri dan kepribadian yang terhormat dan bermartabat.

Pertanyaan berikutnya, mengapa tujuan itu tidak atau belum juga tercapai. Banyak ahli yang menyatakan, setidaknya karena lima krisis, yaitu krisis politik, krisis alat-alat kekuasaan Negara, krisis cara berpikir dan meninjau, krisis moral dan krisis kewibawaan. Dampak dari krisis tersebut yang paling nyata adalah pada dua hal, yaitu *politicking*; berparadigma siapa yang menang. Berpikirkannya selalu menang-kalah dan karena itu yang penting menang, meski dengan cara yang tidak benar dan kedua *economis*, dalam pengertian selalu dalam setiap transaksi sosialnya; di mana, berapa dan apa untungnya.

Cara berpikir seperti itu tentu saja bertentangan dengan sila keempat Pancasila yang jelas menggunakan “bahasa hikmah” yaitu apa yang benar. Sila keempat berbunyi: **dipimpin oleh hikmah**, yaitu kebenaran pengetahuan yang mencerahkan dan membebaskan, bukan dipimpin dengan uang dan nafsu. Lanjutannya: **..dan kebijaksanaan**, yaitu kelapangan keadilan dan pertanggungjawaban. Karena itu, keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan terwujud, kalau cara berpikirkannya siapa yang menang dan apa, berapa dan apa untungnya. Bila ditarik ke atas, mengapa kontrak sosialnya berparadigma ganda, tentu saja karena sila-sila sebelumnya tidak diamalkan secara

baik. Itulah mengapa Negara ini berjalan lamban, bagaikan siput, bila dibanding dengan Malaysia, Singapura dan Thailand, yang nota bene, semula Negara-negara tersebut banyak menimba ilmu dari Indonesia. Akibatnya “Garuda” tidak bisa terbang tinggi, karena “kakinya” digelayuti berbagai krisis di atas.

Sila dalam Pancasila dapat diibaratkan seperti rukun Islam yang kebetulan jumlahnya juga lima. Bila di-Arabkan, *buniyal Indonesia ‘ala khamsin*, maka sama seperti membangun atau bangunan Islam, maka bangunan atau membangun Indonesia juga hanya benar jika sila-silanya ditegakkan dengan baik. Sila-sila sebelumnya menjadi dasar bagi terlaksana-tidaknya sila berikutnya. Sila-sila tersebut tidak terpisah, tapi menjadi satu kesatuan. Sila pertama –mengutip Nurcholish Madjid- adalah sila yang menjadi dasar agar manusia memiliki kesadaran ketuhanan (*omnipresent*) yang menyadari bahwa ia sebagai khalifah di muka bumi, diberi ruang kebebasan untuk memilih sendiri cara dan tindakan dalam rangka perbaikan-perbaikan hidupnya dan sekaligus memberikan pembenaran bagi adanya tanggungjawab manusia atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya tersebut di hadapan manusia dan Tuhan.

Meminjam analisisnya Muhammad Zuhri, seorang Ulama sufi dari Pati, sila pertama sudah seharusnya membentuk kepribadian manusia yang menemukan dirinya sebagai makhluk ruhani, bukan sekadar makhluk jasmani, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan atau bebatuan. Sebagai makhluk ruhani sejatinya ia harus memiliki rasa pertautan bukan hanya dengan “yang di atas” tapi juga dengan “yang yang di bawah” secara setara dan berkeadilan. Ketika dapat seperti ini, maka ia akan jauh dari kepribadian –meminjam istilah Eric From- *necrofil*, kepribadian mayit atau orang yang sudah meninggal yang tidak

punya perasaan atau sudah mati rasa, sehingga tidak merasa bersalah ketika melakukan kesalahan dan tidak merasa menyakiti ketika menindas. Kepribadian inilah yang tampak kentara belakangan ini di masyarakat, bahkan mereka yang berpendidikan dan memiliki jabatan.

Hanya warga Negara bangsa yang Pancasila yang akan selalu menyimpan memorinya secara baik kepada negaranya, bukan ketika ia:

1. Terdeportasi sebagai tenaga kerja illegal atau melintasi batas Negara lain.
2. Tempat menyediakan kuburan bagi tenaga kerja yang gugur karena berbagai faktor ketika berjuang demi asap dapur keluarga,
3. Negara hanya sebatas surat izin, membayar pajak, retribusi, dan lain-lain.

Sebagai kata akhir, mari kita ingat kembali Bhineka Tunggal Ika dan bagaimana mengelolanya dengan baik sesuai dengan dasar Pancasila sebagai *arkanud daulah*, pilar bernegara. Hanya dengan begitu, kita tampil bak bangunan yang utuh, sehingga sedap dipandang, dan karenanya dapat menampung dan mengayomi bukan saja penghuninya, tapi bahkan orang lain yang terkesan dengan “rumah kita”. Indonesia dengan Pancasila adalah “Rumah Bersama” meski dalam perbedaan.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai “Rumah Bersama” dibutuhkan kepemimpinan Negara yang berwibawa, bermartabat, dan memiliki moral yang baik. Dan kepemimpinan seperti ini hanya ada, kalau berkomitmen dan jujur dalam beragama.